

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Pengertian pembangunan itu sendiri menurut Siagian (1984) merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Selanjutnya Ginanjar Kartasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena pembangunan nasional tidak akan tercapai tujuannya tanpa adanya pembangunan diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Pada era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya dan memberikan kewenangan kepada masyarakat secara luas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya, serta kemampuan dan keunikan yang ada pada setiap daerah sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi lokal yang ada, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Otonomi Daerah mengisyaratkan tugas utama pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakatnya, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang merancang suatu program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan daerah yang dimana program tersebut dalam perencanaannya dari masyarakat, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Program ini diberi nama “Gerakan Serempak Membangun Kampung” (GSMK). GSMK merupakan model pembangunan berbasis masyarakat proses pembangunan di pedesaan dengan memanfaatkan kebersamaan persaudaraan dan kegotong royongan menuju kampung/kelurahan mandiri. Program ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aparat dan masyarakat kampung dalam pembangunan;
2. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
4. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam proses pembangunan;
5. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana kampung;
6. Menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan.

Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (GSMK) di Kabupaten Tulang Bawang ini pada tahap pertama direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 –2017) yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahap pertama ini pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur kampung. Tahun 2015 – 2018 pemerintah telah merancang program untuk spesifikasi komoditas pertanian yang potensial di masing-masing kampung.

Sarana yang dapat diajukan oleh masyarakat sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada di tingkat pekon masing-masing adalah irigasi, jalan, jembatan, dan lain-lain. Pembangunan irigasi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pasokan air dan efisiensi pemanfaatan air bagi pertanian tanaman pangan. Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk memperlancar hubungan antar pekon dan juga memperlancar arus transportasi masyarakat.

Dalam upaya mensukseskan program GSMK, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Peraturan Bupati (Perbub) tentang pedoman pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan tahun 2013 membentuk tim Fasilitator Kecamatan (FK) yang dapat membantu Pokmas sebagai penyelenggara program GSMK. Adapun tugas dan fungsi dari FK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membantu dan Memfasilitasi Tim Pembina dan Koordinasi Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan, serta Konsultan Manajemen Pendamping dalam kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Serentak Membangun Kampung/Kelurahan;
2. Membantu dan memfasilitasi Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan;
3. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Kampung/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi penggunaan dana BLM dan pelaksanaan kegiatan;
4. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;

5. Membantu Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Kampung/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kampung/Kelurahan.

Pada penyelenggaraan program GSMK ini, terdapat kelompok yang bertugas sebagai pelaksana program ini. Kelompok Masyarakat atau biasa disebut dengan “Pokmas” berperan pada faktor inti yaitu adalah pelaksana program GSMK di kampung/kelurahan. Terdapat 7 orang pengurus Pokmas dari masing-masing Kampung/Kelurahan, yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Seksi Pelaksana Kegiatan, Seksi Monitoring/Pengawasan, Seksi Evaluasi dan Seksi Pemeliharaan. Salah satu tugas dari Pokmas itu sendiri adalah menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan. Pokmas sebagai inti dari keberlangsungan program ini karena merupakan penyelenggara. Keberhasilan dari Pokmas dalam menyelenggarakan Program GSMK tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kelompok tersebut. Jenkins (1961, dalam Mardikanto, 1993) mengatakan bahwa dinamika kelompok adalah kajian terhadap kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam maupun luar lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota-anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Hal itu dilandasi pemikiran bahwa tercapainya tujuan kelompok akan sangat ditentukan oleh tindakan atau kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh kelompok yang merupakan perwujudan dari perilaku kelompok sebagai suatu kesatuan dari perilaku anggota-anggota kelompok.

Ciri-ciri dinamika kelompok (Slamet, 1978) adalah:

1. Adanya hubungan sosial antar anggota,
2. Adanya interaksi antar komponen-komponen kelompok,
3. Adanya kegiatan saling mempengaruhi,
4. Adanya konflik dan konsekuensi,
5. Adanya perubahan.

Keberhasilan Pokmas dalam menyelenggarakan program GSMK ini tidak lepas dari peran FK dalam mendinamiskan Pokmas. Peran FK disini tidak kalah penting dari peran Pokmas, selaku teknis pemberdayaan Pokmas dalam penyelenggaraan program GSMK. Selain itu, untuk menjadi seorang FK harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan dalam PERBUB Kabupaten Tulang Bawang tentang pedoman pelaksanaan program GSMK tahun 2013.

Salah satu tolak ukur keberhasilan peran Pokmas disini adalah sejauhmana Pokmas dapat menghimpun potensi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat merupakan indikator dari keberhasilan peran Pokmas tersebut. Tabel 1 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat setiap kecamatan yang merupakan evaluasi tahun pertama penyelenggaraan program GSMK tahun 2013.

Tabel 1. Tingkat partisipasi dalam program GSMK Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

No.	Kecamatan	Jumlah Kampung	Kategori
1.	Rawa Jitu Selatan	9	S
2.	Banjar Agung	11	R
3.	Gedung Aji	10	S
4.	Gedung Aji Baru	9	R
5.	Rawa Jitu Timur	8	R
6.	Menggala Timur	10	R
7.	Menggala Kota	9	S
8.	Banjar Baru	10	T
9.	Penawar Aji	9	T
10.	Rawa Pitu	9	R
11.	Meraksa Aji	8	R
12.	Penawar Tama	14	S
13.	Banjar Margo	12	R
14.	Gedung Meneng	11	R
15.	Dente Teladas	11	SR
Jumlah		151	R

Sumber: Laporan Program GSMK, 2013.

Berdasarkan Tabel 1, ada beberapa kategori tingkat partisipasi masyarakat, diantaranya:

- a) Sangat Rendah (SR), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dengan presentase 0% - 20%,
- b) Rendah (R), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat rendah dengan presentase 21% - 40%,
- c) Sedang (S), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat sedang dengan presentase 41% - 60%,
- d) Tinggi (T), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat tinggi dengan presentase 61% - 80%,
- e) Sangat Tinggi (ST), menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan presentase 81% - 100%.

Hal diatas mencerminkan terhadap kedinamikaan Pokmas dalam merangsang partisipasi masyarakat dalam keberlangsungan program GSMK ini.

Uraian di atas menunjukkan masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Sejauhmana peran “Fasilitator Kecamatan” dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Sejauhmana tingkat dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apakah peran “Fasilitator Kecamatan” berhubungan dengan Dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Peranan Fasilitator Kecamatan dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Tingkat Dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?
3. Peranan Fasilitator Kecamatan Dalam Mendinamiskan Kelompok Masyarakat dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung di Kabupaten Tulang Bawang?

C. Kegunaan penelitian

Penelitian ini berguna Sebagai :

1. Bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang.
2. Peneliti sejenis sebagai referensi.